

IDN

IDN

Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App

Install

IDN TIMES


[Home](#) [News](#) [Business](#) [Sport](#) [Tech](#) [Hype](#) [Korea](#) [Life](#) [Health](#) [Automotive](#) [Food](#) [Travel](#) [Science](#) [Men](#)

For You

BSI Berhaji

Suara Kamu

Iklanin di IDN

Soccer Time

#Berhaji

INSIDENESIA

#LokalBerdaya

Profil Dokter

Quiz

BUILT FOR WORDPRESS CREATORS
BY WORDPRESS EXPERTS

Learn More

Hon TERHUBUNG DALAM AKSI Economy

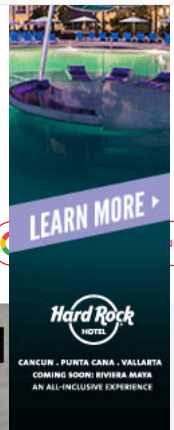
1 April-1 Agustus 2026

Penghapusan MBG Satu Hari demi Hemat Anggaran Rp50 Triliun

27 April 2025

Triyanto

DAFTAR BERANGKAS

Mitra: Kompas IDN VOT
Informasi Selengkapnya
astra.co.id

Intinya Sih

- Pemerintah mengurangi satu hari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis untuk efisiensi anggaran, dengan potensi penghematan hingga Rp50 triliun per tahun.
- Badan Gizi Nasional memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa membentuk tim baru, memanfaatkan struktur internal dan inspektorat yang sudah ada.
- SPPG yang belum memenuhi standar seperti IPAL atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi akan dihentikan sementara, dengan sekitar 1.780 unit sudah terkena kebijakan ini.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?



Share Article



Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

IDN

Jakarta, IDN Times – Wakil Menteri Keuangan Junda Agung menyebut pemerintah akan melakukan penajaman belanja, termasuk pada program Makan Bergizi Gratis (**MBG**), guna menjaga keberlanjutan fiskal negara. Salah satu langkahnya adalah mengurangi hari pelaksanaan program.

Kebijakan ini diambil karena kegiatan belajar siswa hanya sampai Jumat, sehingga pemberian MBG pada Sabtu dinilai tidak efektif dan berpotensi memboroskan anggaran.

"Kami tetap menjalankan program prioritas, tetapi dengan kualitas yang lebih baik dan lebih tepat sasaran. Sebelumnya MBG diberikan hingga Sabtu, sekarang dihapus. Pengurangan satu hari ini dapat menghemat sekitar Rp1 triliun. Dalam setahun, penghematan bisa mencapai Rp50 triliun," ujar Junda dalam Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional di Grha Bhasvara Icchana, Bank Indonesia, Senin (27/4/2026).

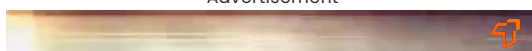
Table of Content

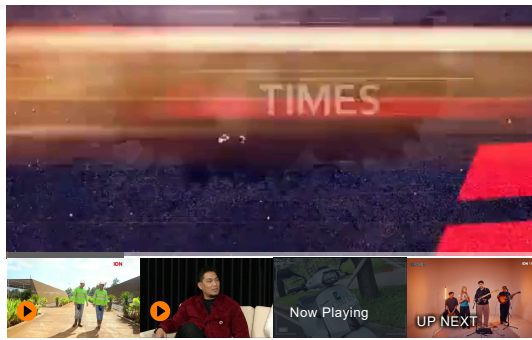


1. BGN perketat pengawasan
2. Tidak ada tim khusus baru untuk lakukan pengawasan
3. SPPG harus memenuhi persyaratan



IDN
- Advertisement -





1. BGN perketat pengawasan



Wakil Menteri Keuangan Juda Agung. Dok Fortune Indonesia

Ia menambahkan, Badan Gizi Nasional ([BGN](#)) juga memperketat pengawasan terhadap kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Unit yang tidak memenuhi standar operasional akan dievaluasi hingga dikenai sanksi, mulai dari penghentian sementara hingga skorsing jika ditemukan pelanggaran berat.

"SPPG yang tidak memenuhi standar nutrisi akan dievaluasi dan dapat diskors. Ini bagian dari upaya penajaman program agar lebih efektif," kata Juda.

2. Tidak ada tim khusus baru untuk lakukan pengawasan



MBG prasmanan di Sukabumi (IDN Times/Siti Fatimah)

Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan pengawasan program MBG tidak dilakukan melalui pembentukan tim khusus baru, melainkan memanfaatkan struktur internal yang sudah ada.

"Ini bukan tim khusus. Secara organik sudah ada di BGN. Kami memiliki tiga wakil, salah satunya menangani investigasi dan komunikasi publik. Selain itu, ada Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang membawahi seluruh SPPG di Indonesia," ujar Dadan.

Ia menambahkan, pengawasan juga diperkuat oleh inspektorat untuk menangani persoalan teknis di lapangan. Seluruh mekanisme tersebut dijalankan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

3. SPPG harus memenuhi persyaratan





Siswa sekolah di Dolok Sanggul saat menikmati MBG perdana di Humbang Hasundutan, Rabu (11/6/2025) (dok.istimewa)

Dalam pengetatan standar, BGN mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan. Unit yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) akan dihentikan sementara.

IDN

“SPPG yang tidak memiliki IPAL atau belum terdaftar SLHS akan kami hentikan sementara. Bahkan, jika sudah mendaftar tetapi dalam satu bulan sertifikat belum terbit, operasional tetap kami hentikan sementara,” ujar Dadan.

Saat ini, sekitar 1.780 SPPG dihentikan sementara dari total 26.800 unit. Namun, jumlah tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses perbaikan.

Share Article



Editor's Picks

Pengusaha Dapur MBG Minta Payung Hukum buat Jamin Program Berlanjut

Pemerintah Sebut Sudah Salurkan 20 Miliar Porsi MBG

Bappisus Bongkar Akal-akalan Pengusaha MBG yang Cuma Kejar Profit

Topics

APBN

MBG

BGN

Anggaran Makan Bergizi Gratis

update me

Makan Bergizi Gratis

Editorial Team



mgid

Konten berikut adalah iklan platform MGID. IDN TIMES tidak terkait dengan materi konten ini.

IDN